



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 April 2022

Yth. Gubernur (daftar terlampir)
di-

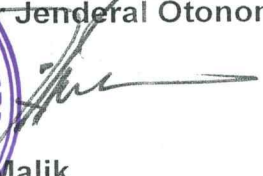
TEMPAT

Nomor : 131/2388/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persiapan Penugasan Penjabat
Kepala Daerah

Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota pada tahun 2022, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (3), ayat (9), dan ayat (11) telah menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya sampai dengan tahun 2022, diangkat Penjabat Bupati/Wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
2. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali kota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022, diminta Saudara Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/Wali kota sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Penjabat Bupati/Wali kota. Usulan dimaksud paling lambat di sampaikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
3. Adapun kriteria dan dokumen pendukung pengusulan Penjabat Bupati/Wali kota diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
 - c. Melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta Biodata calon Penjabat Bupati/Wali kota; dan
 - d. Melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**AN. Menteri Dalam Negeri,
Direktur Jenderal Otonomi Daerah**

Arimat Malik



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Sekretaris Negara.
4. Sekretaris Kabinet.

LAMPIRAN:

Nomor: 131/2388/OTDA

Tanggal: 4 April 2022

1. Gubernur Aceh
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Gubernur Riau
4. Gubernur Sumatera Barat
5. Gubernur Jambi
6. Gubernur Sumatera Selatan
7. Gubernur Bengkulu
8. Gubernur Lampung
9. Gubernur Kalimantan Barat
10. Gubernur Kalimantan Tengah
11. Gubernur Kalimantan Selatan
12. Gubernur Jawa Barat
13. Gubernur Jawa Tengah
14. Gubernur Jawa Timur
15. Gubernur D. I. Yogyakarta
16. Gubernur Bali
17. Gubernur Nusa Tenggara Timur
18. Gubernur Sulawesi Utara
19. Gubernur Sulawesi Tengah
20. Gubernur Sulawesi Tenggara
21. Gubernur Gorontalo
22. Gubernur Maluku Utara
23. Gubernur Maluku
24. Gubernur Papua Barat
25. Gubernur Papua